

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, Abu, dan Cholid Narbuko, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Anshori, Abdul Ghofur , 2006, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Back, H.C, 1979, *Black's Dictionary*, St. Paul Minn: Wes Publishing Co,
- Budiono, Harlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cet. Ke 1, Bandung: PT Citra. Aditya Bakti.
- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti, 2020, *Logika & Argumentasi Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Fuady, Munir, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Abdurrozaq, 2003, *Metode Penelitian*, Medan: Multi Grafika medan.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negera*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta: WR Penerbit.

- Kan, J. van, dan J.H. Beekhuis, tanpa tahun, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Makarim, Edmon, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cyber Notary atau Elektronik Notary*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed, ke-2.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Morgan, Bronwen, Karen yeung, 2007, *A. Interduction to Law and Regulation: text and Materials*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2018, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta; Citra Aditya Bakti.
- Rumokoy, Donald Albert, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, Cetakan Ketiga.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryaningsi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press.
- Sutedy, Adrian, 2015, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1982, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Wiradipradja, E. Saefullah, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media.

W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/POJK.04/2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik.

C. Jurnal

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.

Cet. III. (2016). Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 25.

Jurnal penegakan hukum dan keadilan, vol. 1 No. 2, September 2020, Fak. Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal.139

Novianto M. Hantoro. "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan

Kategori Pejabat Negara". (2016). Jurnal Negara Hukum 7 (2). hal. 148.

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan*

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, Hal. 22

R. Tony Prayogo, "*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah*

Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara

Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty

Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review

Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On

Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", Jurnal Legislasi Indonesia,

Vol. 13 N0. 02, (Juni, 2016) : Hal. 193-195

Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara. (2005). Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. hal. 19

D. Internet

Pamungkas, Faldy T., Fungsi Surat Kuasa: Pengertian, Jenis, Contoh dan Unsur, diakses dari <https://blog.justika.com/keluarga/fungsi-surat-kuasa/> , pada tanggal 19, pukul 21.15.

IDX, “Panduan Go Public”

<https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/ForCompany/Panduan-Go-Public.pdf> diakses pada 1 Mei 2022 pukul 22:01